

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Globalisasi ditandai dengan memudarnya batas-batas yuridiksi suatu Negara, secara otomatis globalisasi akan membentuk persaingan pasar internasional yang terbuka dan akan mempengaruhi tatanan ekonomi dan politik global, sehingga secara tidak disadari penduduk suatu negara akan semakin terbiasa dengan perdagangan bebas.

Globalisasi telah mempengaruhi setiap aspek kehidupan saat ini, Indonesia merupakan sebuah Negara yang tidak bisa menghindar dari laju globalisasi. Untuk bisa bersaing di kawasan Asia Pasifik maka dipilahlah Batam sebagai sebuah daerah pengembangan Industri. Pemilihan Pulau Batam sebagai pusat pengembangan industri dan kawasan berikat dilihat dari posisi pulau Batam yang strategis di Selat Malaka, yang merupakan salah satu jalur perdagangan terpadat di dunia.

Sebuah pulau yang dulunya hanya dihuni oleh para nelayan dan hanya berpenduduk 6000 jiwa, saat ini setelah menjadi kawasan perdagangan bebas jumlah penduduk Batam meningkat menjadi 724,315 jiwa di tahun 2007. Dalam jangka waktu yang relatif singkat telah berdiri fasilitas umum seperti pelabuhan, jaringan jalan, perumahan, pariwisata, hotel, pusat perbelanjaan, serta kawasan industri yang merupakan indikator pertumbuhan ekonomi Batam. Badan Pusat Statistik Batam menunjukkan bahwa hingga Desember 2006 Pendapatan Domestik

Regional Bruto (PDRB) Pekapita non migas Batam mencapai Rp41.990.000. Angka ini lebih besar dibandingkan PDB Perkapita Indonesia yang hanya mencapai Rp15.000.000. Pesatnya pembangunan di kawasan pulau tersebut menjadikan Batam sebagai kota modern.¹

Batam sebagai kawasan berikat telah banyak mengalami perkembangan, meningkatnya arus globalisasi menjadikan perdagangan bebas meluas hingga pulau Bintan dan Karimun. Oleh sebab itu pemerintah membuat suatu perubahan konsep dari kawasan berikat (*bounded zone*) menjadi kawasan perdagangan bebas (*free trade zone*,) dan terus melakukan penyempurnaan terhadap penetapan Undang-undang FTZ dengan tujuan mempertahankan situasi dan kondisi Batam yang sebenarnya telah menjalankan fungsi-fungsi FTZ sejak tahun 1978.

Maka menarik untuk melihat bagaimana perkembangan pembangunan pulau Batam setelah dibelakukannya kebijakan perdagangan dan pelabuhan bebas. Sehingga mendorong penulis untuk mengkaji fenomena tersebut.

B. Tujuan Penulisan

Secara garis besar beberapa tujuan utama bagi penulis untuk melakukan penelitian adalah :

¹ Otorita Batam Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam , *Development Progress of Batam 2nd Semester of 2007*, cet.I 2008, hal 29

1. Untuk menjawab pokok permasalahan dengan menggunakan teori-teori serta membuktikan hipotesa berdasarkan fakta dan data
2. Meneliti dan mengetahui proses pembentukan kebijakan *Free Trade Zone* dan mendiskripsikan pengaruh dari kebijakan tersebut terhadap pembangunan kawasan pulau Batam.
3. Mempelajari bagaimana perkembangan pulau Batam ketika kebijakan *Free Trade Zone* telah berlaku.
4. Untuk memenuhi tugas akhir dalam menyelesaikan program SI jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

C. Latar Belakang

Pulau Batam nyaris tidak menghiasi catatan penting sejarah perekonomian Indonesia hingga tahun 1970. Pulau seluas 415 km² ini terletak persis di sebelah timur laut Pulau Singapura. Kedua pulau ini mengapit mulut Selat Malaka di sisi timur sehingga membentuk gapura selat yang panjangnya hampir 20 km. Pulau Batam dan Pulau Singapura laksana dua penjuru di gerbang Selat Malaka. Di sebelah timur yang jaraknya sekitar 10 km dari bibir pantai Pulau Batam, terdapat Pulau Bintan. Sementara dari arah barat daya, yang hanya terpaut sekitar 2,5 km dari Batam akan terlihat dengan jelas Pulau Bulan. Selain itu berbaris rapat ratusan gugusan pulau kecil yang membentang di sekitar Pulau Batam sampai ke Pulau Galang.

Hingga tahun 1971 Pulau Batam hanya dihuni oleh 6.000 jiwa, sebuah pulau yang sunyi dan dihuni oleh para nelayan. Penduduk di sekitar dan dalam Pulau Batam menggantungkan kehidupan sehari-harinya dari kekayaan hasil laut yang dijual ke Singapura. Roda aktivitas kehidupan sehari-hari masyarakat di pulau ini belum terjamah oleh arus modernis, hal ini sangat bertolak belakang jika melihat kondisi pulau tetangga yaitu Singapura yang pada saat itu mulai tumbuh menjadi raksasa ekonomi di Asia Tenggara. Padahal seharusnya Batam bisa memainkan peranan penting dan vital di Selat Malaka, minimal menjadi mitra strategis bagi Singapura. Namun saat itu, baik Pemerintah Pusat maupun daerah belum secara maksimal memanfaatkan potensi Pulau Batam.

Dengan batas geografis sebelah utara berbatasan dengan Singapura dan Malaysia, sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Karimun, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Daik Lingga, dan sebelah Timur berbatasan dengan Pulau Bintan. Menjadikan Batam sebagai proyeksi pemerintah sebagai Singapura-nya Indonesia, sehingga menjanjikan masa depan yang cerah. Oleh sebab itu Pemerintah dibawah pengawasan Otorita Batam melakukan pengembangan Pulau Batam. Perkembangan Pulau Batam dimulai sejak 32 tahun lalu berdasarkan Keppres No.74 Tahun 1971. Proses pembangunan Pulau Batam dimulai dengan pengembangan kawasan industri Batu Ampar yang terletak di pinggir pantai. Sejak itu sejumlah perusahaan di Singapura langsung merelokasikan industrinya ke Batam.

Struktur ekonomi Batam secara garis besar dapat dibagi dalam 9 sektor. Kesembilan sektor ini dapat memicu perkembangan pembangunan di kawasan Pulau Batam yaitu : 1. Industri, 2. Perdagangan, Hotel, dan Restoran, 3. Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan, 4. Pertanian, 5. Pengangkutan dan Komunikasi, 6. Bangunan dan Konstruksi, 7. Pertambangan dan Penggalian, 8. Listrik dan Air Bersih, 9. Jasa-jasa.²

Industri merupakan sektor yang sangat potensial dalam mempercepat laju pertumbuhan Pulau Batam. Menurut data dari Otorita Batam pada akhir tahun 2000 tercatat 477 investor asing menanamkan modalnya di Batam yang nilainya mencapai 1,9 juta dolar AS. Kebijakan pemerintah dalam memberlakukan Batam sebagai kawasan perdagangan bebas, menjadikan daerah ini salah satu daerah dengan pertumbuhan dan pendapatan ekonomi tertinggi di Indonesia. Semakin bertambahnya jumlah investasi yang ditanamkan di kawasan ini, sangat berpengaruh pada kemajuan perekonomian dan pembangunan kawasan di kota Batam.

Selama ini secara *de facto* Batam telah menjadi zona perdagangan bebas, mekanisme dari daerah yang memberlakukan kebijakan sebagai kawasan perdagangan bebas, yaitu dengan tidak memberlakukan tarif bea masuk terhadap barang, dan adanya fasilitas keringanan pajak terhadap perusahaan asing. Hal ini merupakan implementasi dari globalisasi yang dapat menyebabkan integrasi ekonomi. Jika dilihat dari sisi positif atau tujuan jangka panjang, perdagangan bebas dapat memberikan manfaat bagi terwujudnya arus perdagangan yang lebih

² Ibid, hal 25

lancar. Adanya pasar efisiensi dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi di Batam.

Globalisasi memang tidak bisa dibendung, terjadinya transformasi, modernisasi dan investasi merupakan bagian dari banyak hal yang akan memberi ciri sebuah dunia global yang tidak mengenal batas-batas teritorial. *Free Trade Zone* (FTZ) dapat didefinisikan sebagai sebuah kawasan dengan batas-batas fisik yang jelas sehingga berakses terbatas di dalam wilayah suatu Negara, yang dikecualikan dari peraturan pabean setempat. FTZ berfungsi sebagai sarana perdagangan bebas, bongkar muat dan penyimpanan barang, serta *manufacturing*, dengan atau tanpa pagar pembatas di sekeliling wilayah, dengan akses terbatas yang dijaga petugas bea cukai³.

Sebagai kawasan industri terbesar di Indonesia dan terkemuka di Asia Pasifik, Batam memiliki daya tarik bagi investor untuk menanamkan modalnya, yaitu posisi geografisnya digaris pertumbuhan Sijori (Singapura, Johor, Riau) sebagai daerah FTZ, dengan insentif pajak dan bea masuk relatif rendah, serta ketersediaan lahan dan tenaga kerja yang murah. Demikian juga dengan adanya fasilitas infrastruktur dan birokrasi dalam Badan Otorita dapat memudahkan investor asing untuk menanamkan modalnya. Adanya kebijakan FTZ akan mempermudah ruang gerak investor, sehingga berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan memperluas lapangan kerja. Dibentuknya undang-undang FTZ telah menjadi kebutuhan mutlak bagi Batam, hal ini diyakini akan menghadirkan

³ Wendi Aritonang, *Menuju Batam Yang Lebih Cemerlang*, Khanata, Jakarta 2003, hal 11

perubahan esensial bagi Batam khususnya dan Indonesia pada umumnya. Pada kenyataannya Batam secara *de facto* telah menjadi kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas. Namun secara *de jure* aturan yuridis FTZ masih dalam proses legislasi.

Pada tanggal 20 Agustus 2007 pemerintah kembali meratifikasi Peraturan yang mengatur kawasan perdagangan bebas (*free trade zone*) di kepulauan Riau yaitu Batam, Bintan dan Karimun. Peraturan pemerintah yang dikeluarkan adalah PP No 46 Tahun 2007 mengenai Kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam, PP No 47 Tahun 2007 mengenai Kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Bintan, dan PP No 48 Tahun 2007 mengenai Kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Karimun. Dalam PP perdagangan bebas ini semua barang tidak dikenai bea masuk.

Adanya pemberlakuan kebijakan Pemerintah mengenai zona perdagangan bebas di Kawasan Pulau Batam, Bintan, dan Karimun merupakan kebijakan politik dan hubungan internasional yang dilakukan para aktor yang akan memberikan pengaruh terhadap tatanan ekonomi dan politik global.

D. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka pokok permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut : Bagaimana Pengaruh Kebijakan *Free Trade Zone* Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Kawasan Pulau Batam pada tahun 2000-2007?

E. Kerangka Teori

Untuk menjawab pokok permasalahan yang telah diuraikan, maka penulis perlu mendeskripsikan jawaban dengan menggunakan teori dan konsep. Teori dan konsep yang digunakan dapat juga disajikan sebagai sarana eksplanasi dan dapat dijadikan sebagai dasar bagi prediksi penelitian penulis.

Dalam hal ini penulis memiliki beberapa konsep dan teori yang akan menjadi kerangka dasar yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Konsep Globalisasi

Istilah Globalisasi pertama kali digunakan oleh Theodore Levitt tahun 1985 yang menunjuk pada politik-ekonomi, khususnya politik perdagangan bebas dan transaksi keuangan. Secara sederhana globalisasi dipahami sebagai suatu proses pengintegrasian ekonomi nasional bangsa-bangsa ke dalam suatu sistem ekonomi global. Namun, jika ditinjau dari sejarah perkembangan ekonomi, globalisasi pada dasarnya merupakan salah satu fase perjalanan kapitalisme liberal, yang secara teoritis sebenarnya telah dikembangkan oleh Adam Smith.⁴

Definisi umum globalisasi adalah upaya pemilik modal untuk mengintegrasikan ekonomi, politik, pasar, dan sosial kedalam satu unit yang homogen untuk seluruh dunia. Menurut Nayan Chanda globalisasi merupakan fenomena ekonomi utama yang meliputi peningkatan interaksi atau integrasi

⁴ Mansour Fakih, *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*, Insist Press bersama Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2001, hal 211

dari sistem ekonomi nasional terhadap pertumbuhan perdagangan internasional, investasi dan arus modal.⁵

Globalisasi bisa dikatakan telah berjalan ketika ditetapkan formasi sosial global baru dengan ditandai oleh diberlakukannya secara global suatu mekanisme perdagangan melalui penciptaan kebijakan perdagangan bebas. Fenomena globalisasi bukan lagi hal yang mencengangkan sebab konsep perdagangan bebas sudah diatur dan dipersiapkan sejak lama untuk membangun sinergitas dalam kompetisi yang adil dan sehat. Setiap Negara-negara bangsa dituntut untuk dapat bersaing secara global. Agar dapat bersaing dengan Negara-negara di Kawasan Asia Pasifik dan Pasar Global, Pemerintah Pusat menetapkan suatu kebijakan untuk menjadikan Pulau Batam sebagai salah satu kawasan industri, investasi dan perdagangan bebas di Indonesia.

2. Konsep Perdagangan Bebas

Di era globalisasi ini hampir setiap negara menerapkan kebijakan perdagangan bebas. Kebijakan ini sebagai sebuah konsep ekonomi dimana lalu lintas perdagangan antar bangsa dilakukan secara bebas tanpa hambatan, tanpa bea masuk, sistem kuota perdagangan maupun birokrasi pengurusan yang berbelit-belit.

Pemikiran dasar perdagangan bebas ini pertama kali dipopulerkan dari konsep ekonomi liberalnya David Ricardo dan Adam Smith yang timbul atas kritikan terhadap nasionalisme ekonomi. Mereka berpendapat cara yang

⁵ Drs. Harwanto Dahlan , M. A. bahan mata kuliah Globalisasi, 2008

sangat tepat dan paling efektif untuk dapat meningkatkan kekayaan nasional justru dengan membiarkan pertukaran antar individu dalam ekonomi domestik dan internasional berjalan secara bebas tanpa dibatasi,⁶ dengan kata lain dua ilmuwan ekonomi ini menganjurkan pemberlakuan perdagangan bebas.

Kaum Liberal berasumsi bahwa dengan adanya sebuah perdagangan bebas individu (yaitu konsumen, perusahaan atau pun wiraswasta individual) disebut sebagai aktor utama dimana para aktor ini dibiarkan bebas mengejar kepentingan sendiri dalam suatu ekonomi perdagangan yang didasarkan pada suatu pembagian kerja dan struktur atau komposisi faktor-faktor produksinya sendiri, sehingga nantinya kesejahteraan suatu kelompok individu, suatu bangsa maupun kelompok bangsa akan dapat ditingkatkan.

Hal inilah yang mendorong setiap Negara untuk memberlakukan kebijakan yang sama demi memperbanyak arus perdagangan yang nantinya akan memberikan dampak kemajuan bagi pertumbuhan pembangunan sebuah kawasan tersebut. Untuk itu Negara selalu berusaha untuk menaikkan volume perdagangan agar perekonomiannya semakin meningkat. Maka dalam hal ini Michael P. Todaro berpendapat bahwa ada tiga manfaat perdagangan bagi suatu Negara:⁷ Pertama, perdagangan merupakan penggerak pertumbuhan ekonomi penting. Perdagangan memperbesar kapasitas konsumsi suatu Negara, menaikkan output dunia dan memberikan kemudahan untuk mendapatkan sumber daya yang langka dan pasar dunia bagi produk-produk

⁶Mochtar Mas'ood, *Ekonomi-Politik Internasional dan Pembangunan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta: cet.II. 2003, hal 41.

⁷Michael P. Todaro, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, terj. Burhanuddin Abdullah dan Haris Munandar, Erlangga 1994, hal 22-23

yang dihasilkan. Tanpa adanya perdagangan maka akan sulit bagi Negara-negara miskin untuk berkembang. Negara miskin hanya akan menjadi penonton dan mudah diperdaya oleh Negara kaya tanpa mampu melawan.

Kedua, perdagangan cenderung untuk mendorong penyebaran keadilan internasional dan domestik secara lebih merata dengan meningkatkan pendapatan riil Negara-negara yang berdagang dan menjadikan penggunaan persediaan sumber daya di setiap Negara menjadi lebih efisien, misalnya adalah meningkatnya upah buruh di Negara yang banyak pekerjanya dan menurunkan upah buruh di Negara-negara yang kekurangan tenaga kerja.

Ketiga, perdagangan membantu setiap Negara untuk mencapai pembangunan, dengan meningkatkan peranan sektor ekonomi yang mempunyai keunggulan komparatif, baik karena efisiensi penggunaan tenaga kerja maupun karena faktor produksi.

Adapun manfaat langsung dari perdagangan bebas adalah penanaman modal asing, penciptaan lapangan kerja langsung dan tidak langsung, penyediaan sarana industri berkualitas dengan biaya murah karena terkonsentrasi disuatu kawasan, dan peningkatan pendapatan devisa Negara⁸. Jika ditinjau dari letak geografisnya yang sangat strategis di jalur perdagangan padat dunia, kawasan Pulau Batam memiliki potensi yang sangat bagus sebagai sebuah daerah yang memberlakukan kebijakan kawasan perdagangan bebas (*free trade zone*).

⁸ Wendi Aritonang, *Menuju Batam Yang Lebih Cemerlang*, Khanata, Jakarta 2003, hal 15

Semenjak mulai dirintis untuk menjadi kawasan industri strategis pada awal tahun 70-an hingga sekarang Batam mengalami kemajuan dan pertumbuhan yang sangat cepat, dengan kemudahan akses lalu lintas perdagangan, kawasan pulau Batam menjelma menjadi bandar perdagangan dan pelabuhan terkemuka di kawasan Asia Pasifik.

Pola *Free Trade Zone* dengan visi liberalisasi perdagangan, dapat berdampak positif bagi industri. Target investasi yang tinggi akan menjadi indikator utama bagi Batam setelah ditetapkannya UU FTZ. FTZ bukan hanya penghapusan hambatan tarif bea masuk, lebih dari itu adanya fasilitas undang-undang dapat menstimulasi perdagangan dan arus barang.

3. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan pada dasarnya merupakan sebuah versi dari teori modernisasi dan pembangunan. W.W Rostow melihat perubahan sosial yang disebut pembangunan sebagai proses evolusi dari masyarakat tradisional ke modern yang dijelaskan dalam lima tahapan pembangunan ekonomi⁹. Tahap pertama adalah masyarakat tradisional, tahap kedua, prakondisi tinggal landas, tahap ketiga, masyarakat tinggal landas, tahap keempat adalah tahap masyarakat pematangan pertumbuhan dan tahap terakhir mencapai masyarakat modern yang dicita-citakan yaitu masyarakat industri. Untuk mencapai masyarakat modern dibutuhkan modal sebagai syarat utama proses pembangunan. Modal dapat berasal dari penggalan investasi melalui sumber dana dan kebijakan pajak, dari obligasi pemerintah, devisa dari perdagangan

⁹ Mansour Fakih, *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*, Insist Press bersama Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2001, hal 55

internasional dan yang sangat merangsang pertumbuhan ekonomi adalah modal yang berasal dari investasi asing.

Dalam kaitannya mengenai lima tahapan pembangunan menurut Rostow, pembangunan Pulau Batam terbagi dalam lima periode:

a. Periode Persiapan (1971-1976)

Dikenal dengan nama Periode Dr.Ibnu Sutowo. Ibnu Sutowo yang awalnya menjabat sebagai Direktur Umum Pertamina pada periode ini diangkat menjadi Kepala proyek pengembangan Pulau Batam, beliau berusaha melakukan terobosan dengan mendekatkan pusat distribusi minyak ke pasar global. Batam berhasil menjadi pangkalan operasi dan logistik minyak dan gas bumi sebagai pusat alih kapal kawasan Asia Timur. Berdasarkan KepPres Nomor 74 tahun 1971 menjadikan wilayah Batu Ampar sebagai daerah industri dengan status *enterport partikulir* untuk memfasilitasi kegiatan basis logistik dan operasional. Status tersebut memberikan keleluasaan kepada perusahaan yang terlibat dalam operasi dan logistik minyak yang membutuhkan barang impor. Saat itu pembangunan kawasan Pulau Batam dikelola oleh Badan Pimpinan Industri Pulau Batam.

Pada tahun 1972 untuk pertama kali Batam berhasil melaksanakan praktik alih kapal (*trans-shipment*) saat kapal berbendera Panama bersandar di Batam. Kapal bernama "Les Bessel" dengan tujuan Belawan, Dumai, Pusri IV Palembang dan Cilacap, membongkar muatannya di

Batam. Kegiatan itu dilakukan atas bantuan kapal tongkang dan memindahkan isi ke kapal lainnya, ini menjadi peristiwa *trans-shipment* kapal pertama di Batam. Dua tahun berikutnya, berdasarkan KepPres Nomor 47 tahun 1973 menetapkan Pulau Batam sebagai daerah kawasan Industri Pulau Batam. Kemudian dalam rangka persiapan tinggal landasan pada Pelita IV, maka Pemerintah mengembangkan Pulau Batam menjadi Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam, yang dikelola oleh Badan Otorita Batam.

b. Periode Konsolidasi (1976-1978)

Dipimpin oleh Prof.Dr.JB.Sumarlin adalah seorang Menteri Penertiban Aparatur Pembangunan. Sebelum berstatus sebagai *bounded warehouse*, kawasan Batu Ampar telah ditetapkan sebagai daerah industri berstatus *entreport partikulir*, sehingga di dalam kawasan tersebut telah terdapat kegiatan industri bukan hanya pergudangan saja. Pada periode ini atau dapat dikatakan masa pasca krisis Pertamina, pembangunan Batam seperti berjalan ditempat, hal ini tidak lain disebabkan oleh kemerosotan dominasi minyak dalam perekonomian dunia. Hingga tahun 1977 minyak dan gas tidak lagi menjadi primadona ekonomi Indonesia. Secara ekonomis pertumbuhan sektor minyak dan gas tidak memberikan kemajuan yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Pulau Batam. Posisi JB. Sumarlin nyaris tidak memberikan pengaruh terhadap pembangunan ekonomi Batam. Namun beliau mulai mengeluarkan

sejumlah kebijakan untuk menata kembali Pulau Batam sebagai kawasan industri masa depan.

Periode konsolidasi merupakan era terjadinya proses transisi dalam tahap prakondisi tinggal landas. Dalam Kebijakan-kebijakan ini tersirat sebuah keinginan pemerintah untuk menjadikan Pulau Batam sebagai kawasan industri di masa datang. Batam mulai diarahkan menjadi kawasan industri berskala internasional, tidak hanya sebagai basis logistik operasional industri minyak dan gas bumi. Kehadirannya dapat dikatakan bak benih yang siap berkembang ketika akan memasuki era pertumbuhan pesat, terutama di sektor industri elektronika.

**c. Periode Pembangunan Sarana Prasarana dan Penanaman Modal
(1978- 1998)**

Periode ini berlangsung selama 20 tahun dibawah kepemimpinan Prof.Dr.B.J Habibie, pemimpin yang konsisten dan serius menjadikan Batam sebagai kawasan ekonomi prospektif. Obsesi dan pemikiran beliau sepenuhnya tercurah pada pembangunan Pulau Batam, pulau yang semula tidak memiliki nilai ekonomi bagi Indonesia. Periode ini dapat dikatakan sebagai tahap tinggal landas karena merupakan awal dipacunya pembangunan infrastruktur dan penanaman modal di Batam yang masih berstatus *bounded warehouse*. Pada tahun 1979 untuk pertama kalinya dibentuk rencana induk pembangunan kawasan industri dan pusat alih

kapal, tempat penimbunan barang ekspor dan impor, pariwisata serta berbagai prasarana dan sarana pendukung lainnya,.

Periode Pembangunan Sarana Prasarana dan Penanaman Modal merupakan awal dipacunya pembangunan infrastruktur dan penanaman modal di Batam karena periode ini Batam ditetapkan sebagai kawasan berikat (*bonded zone*) berdasarkan KepPres Nomor 28 tahun 1992. Pembangunan mulai diarahkan menjadi kawasan industri berskala internasional yang sangat menjanjikan, sehingga banyak investor asing mulai mendirikan usaha dan berinvestasi di Batam. Pada tahun 1990 hingga 1995 pertumbuhan ekonomi Batam meningkat dengan cepat dan industri Batam mampu bersaing di kawasan Asia Pasifik. Indikator pertumbuhan ekonomi Pulau Batam meliputi; investasi, PDRB, UKM, perusahaan industri, kontribusi pajak, ekspor non migas dan devisa wisatawan asing.

Dengan konsep yang disebut master plan, sebuah kawasan industri modern di Batam disusun dan direncanakan. Otorita Batam membangun berbagai prasarana dan sarana infrastruktur, fasilitas untuk industri manufaktur, perdagangan, dan pariwisata berskala internasional. Selain itu pada periode kepemimpinan B.J Habibie juga dibangun Bandara Internasional Hang Nadim. Kemudian kepemimpinan berikutnya dipegang oleh J.E Habibie yaitu bulan Maret s/d juli 1998. Periode ini dikenal dengan nama Pembangunan Prasarana dan Penanaman Modal Lanjutan.

d. Periode Pengembangan Pembangunan Prasarana dan Penanaman Modal Lanjutan dengan Perhatian Lebih Besar Pada Kesejahteraan Rakyat dan Perbaikan Iklim Investasi (1998-2005)

Periode ini dipimpin oleh Ismeth Abdullah. Kehadirannya selain mengemban misi melanjutkan tugas pengembangan yang telah dirintis pendahulunya, juga mempertahankan eksistensi Batam. Suatu perbaikan dalam meningkatkan daya saing Batam sebagai sentra industri regional prospektif diharapkan dapat tercapai. Ismeth Abdullah mengembangkan suatu gagasan membumi yang disebut "Membangun Batam: Untuk Rakyat dan Bersama Rakyat".¹⁰ Tujuan dari gagasan tersebut adalah agar Batam mampu bertahan dan tetap eksis, oleh karena itu Batam harus menjadi milik masyarakat.

Proses pembangunan Batam lebih diprioritaskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Gagasan konseptual aplikatif bertajuk *social development concept* merupakan konsep pendekatan baru dalam mengembangkan Batam, dan memberikan kesempatan kepada sektor non-ekonomi, seperti tempat pemukiman yang layak pendidikan, aspek agama dan budaya, serta keamanan. Pengaruh Ismeth Abdullah terbukti saat dianugerahkannya penghargaan *Social and Cultural Award* oleh paguyuban orang melayu. Sebagai realitas sosial yang mengindikasikan adanya kemajuan ke arah yang lebih baik.

¹⁰ Freddy Roeroe, Jeffrey Rawis, Jopie Worek, Feybe Lumanauw, Michael Umbas, Novy Lumanauw, *BATAM, Komitmen Setengah Hati*, Aksara Karunia, Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan, cet. I. 2003, hal 36-37

e. Periode Pengembangan Batam dengan Penekanan Pada Peningkatan Sarana dan Prasarana Penanaman Modal Serta Kualitas Lingkungan Hidup (2005-sekarang)

Periode ini dipimpin oleh Mustofa Widjaja. Pada periode ini pembangunan lebih ditekankan pada peningkatan sarana dan prasarana penanaman modal, seperti salah satunya penetapan kebijakan Batam *Free Trade Zone*. Dengan adanya kebijakan ini diyakini pemerintah dapat meningkatkan laju investasi di Pulau Batam. Karena para investor diberikan fasilitas yang memudahkan mereka untuk menanamkan modalnya di Batam.

Pembangunan di kawasan Batam yang tumbuh pesat, khususnya dibidang ekonomi, tidak lepas dari adanya arah dan kebijakan yang tepat, yaitu meletakkan prioritas pembangunan pada sektor industri, perdagangan, jasa, pariwisata dan alih kapal dengan menarik sebesar-besarnya peran investor asing dan domestik berskala besar. Periode ini dapat dikatakan sebagai tahap masyarakat pematangan pertumbuhan. Kemajuan pembangunan tersebut jelas memberi dampak positif berupa peluang usaha yang mempengaruhi pula aspek sosial dan ketenagakerjaan. Pertumbuhan ekonomi menciptakan peluang usaha baru yang tidak selalu dapat disediakan oleh investor berskala besar, seperti pasokan bahan dan materi pendukung, termasuk kebutuhan bahan pangan dan bahan baku lainnya bagi industri Batam.

Selain itu pembangunan yang pesat juga dipengaruhi oleh iklim ekonomi yang kondusif. Iklim ekonomi yang kondusif dapat terus terlaksana jika didukung dengan penetapan status hukum Pulau Batam menjadi kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas atau *Free Trade Zone*. Maka pada periode ini pemerintah telah mengeluarkan PP Nomor 46 tahun 2007 mengenai FTZ.

F. Hipotesis

Kebijakan *Free Trade Zone* yang ditetapkan oleh Pemerintah di kawasan Pulau Batam, telah memberikan pengaruh positif berupa peningkatan pembangunan disegala bidang, terutama dalam percepatan pertumbuhan ekonomi pada sektor, investasi industri, penerimaan pajak dan penerimaan kota Batam, pemasukan devisa, serta ekspor non migas. Disamping itu Batam-FTZ juga menimbulkan dampak negatif berupa masalah yang mempengaruhi aspek sosial seperti, masalah ketenagakerjaan, kependudukan, dan penyelundupan.

G. Jangkauan Penelitian

Batasan waktu penting ditetapkan agar kajian ini lebih fokus, maka penulis menetapkan batasan waktu penelitian ini, sebelum ditetapkannya kebijakan FTZ tahun 1997 dan setelah ditetapkannya undang-undang RI Nomor 36 tahun 2000

mengenai perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (FTZ), hingga diratifikasi menjadi PP Nomor 46 tahun 2007 (1997-2007).

H. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan (*library research*) dari berbagai literatur dengan menghimpun data-data yang relevan dengan objek penelitian. Data-data diperoleh dari buku, jurnal, artikel baik cetak maupun elektronik dari internet, serta melalui studi kepustakaan (*library research*).

I. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan, berisi alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka teoritis, hipotesa, jangkauan penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : Memaparkan Fenomena Globalisasi Ekonomi, Dinamika Kebijakan *Free Trade Zone* di Era Globalisasi dan Proses Penetapan Kebijakan *Free Trade Zone* di Pulau Batam.

BAB III : Membahas tentang Gambaran Pertumbuhan Ekonomi Pulau Batam sebelum ditetapkannya kebijakan *Free Trade*

Zone, dan Pertumbuhan Ekonomi Pulau Batam setelah
ditetapkannya kebijakan *Free Trade Zone*.

BAB IV : Analisa mengenai Pengaruh Kebijakan *Free Trade Zone*
Terhadap Pembangunan Pulau Batam.

BAB V : Penutup, berisi kesimpulan.